

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Kependudukan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Penduduk Perempuan yang Tidak Tamat SMP

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah penduduk perempuan yang tidak tamat SMP adalah banyaknya orang berjenis kelamin perempuan yang tidak menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir jenjang pendidikan SMP di sekolah negeri maupun swasta dengan tidak mendapatkan tanda tamat/ijazah.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Perempuan yang tidak tamat SMP adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang tidak menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir jenjang pendidikan SMP di sekolah negeri maupun swasta dengan tidak mendapatkan tanda tamat/ijazah.
- SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.
- Menurut Permendagri No. 54 tahun 2010, jenjang pendidikan berdasarkan kelompok usia SMP adalah 13-15 tahun.

RUJUKAN

- Permendagri No. 54 tahun 2010
- Permendagri No. 86 tahun 2017

RUMUS

Angka Putus Sekolah (APS) SMP untuk Perempuan

$$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SMP untuk perempuan di satu Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMP untuk perempuan di satu Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$$

Teknik penghitungan

- Tahap pertama adalah terlebih dahulu mengetahui capaian kinerja APS SMP untuk perempuan se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap kedua dilakukan dengan mendata jumlah capaian kinerja APS SMP untuk perempuan se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap ketiga adalah mendata jumlah seluruh APS SMP untuk perempuan se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap terakhir yaitu dengan membagi perolehan data kuantitatif pada tahap kedua dengan tahap ketiga, selanjutnya dikali dengan 100%.

WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UKURAN

Persen (%)

UNIT

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

KEGUNAAN

1. Mengetahui gambaran umum mengenai jumlah penduduk tidak tamat SMP berdasarkan jenis kelamin;
2. Penentuan kebijakan yang berkaitan dengan sektor lapangan usaha dimana dengan informasi pendidikan yang dimiliki penduduk, pemerintah akan lebih dapat menyediakan lapangan usaha yang sesuai dengan pendidikan penduduk umumnya berdasarkan jenis kelamin;
3. Mengetahui kualitas sumber daya manusia (SDM) dikaitkan dengan program kebijakan lainnya seperti bidang kesehatan, penuntasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan.

INTERPRETASI

Nilai angka penduduk putus SMP untuk perempuan berkisar antara 0-100%. Semakin sedikit jumlah ijazah/STTB SMP yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk perempuan di suatu wilayah, maka semakin tinggi persentase penduduk putus SMP untuk perempuan. Dalam hal ini mencerminkan adanya kejadian penduduk perempuan yang putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat semakin banyak, artinya bahwa tingkat pencapaian sebagian besar penduduk perempuan di suatu wilayah banyak yang tidak mencapai jenjang pendidikan tamat SMP.

KETERANGAN

Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.

SUMBER

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul modul Sosial Budaya dan Pendidikan

METODOLOGI

1. Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
2. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat pendidikannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan

pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.

3. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah ibu rumah tangga, istri, atau anggota rumah tangga lain yang berjenis kelamin perempuan yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

SIPD

